

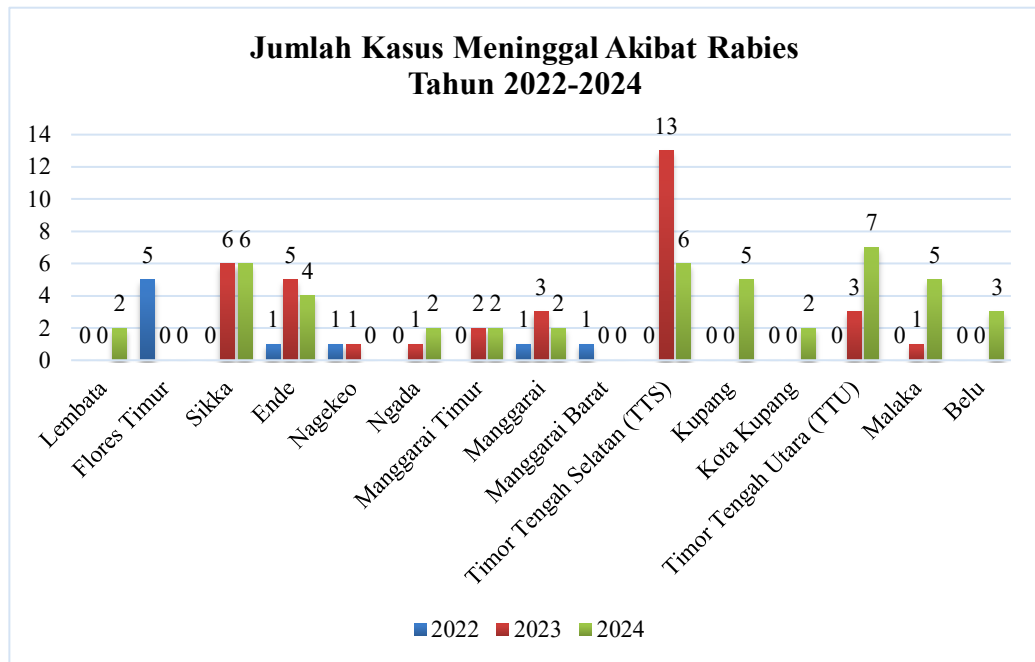
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dan Australia memiliki sejarah panjang dalam menjalin kerja sama bilateral, khususnya dalam sektor kesehatan. Salah satu wujud nyata kerja sama ini adalah program *Australia-Indonesia Health Security Partnership (AIHSP)*, yang dimulai dengan penandatanganan perjanjian oleh kedua negara pada tahun 2020 sampai tahun 2025. AIHSP diumumkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada Februari 2020. Australia dan Indonesia telah sepakat bahwa AIHSP juga akan mendukung agenda transformasi sektor kesehatan, melalui peningkatan layanan kesehatan primer dan kesehatan masyarakat. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam konteks ini menjadi salah satu wilayah prioritas, karena tingginya kasus rabies yang telah menjadi permasalahan kesehatan masyarakat selama bertahun-tahun.

Data kasus orang meninggal akibat rabies dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT pada tahun 2022-2024 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan baik jumlah orang yang meninggal maupun jumlah kabupaten yang terpapar kasus rabies sebagaimana pada grafik 1. Kasus rabies pada tahun 2022 hanya mencakup 5 kabupaten yaitu Flores Timur, Ende, Nagekeo, Manggarai dan Manggarai Barat, yang semuanya terletak di Pulau Flores. Kasus rabies dengan korban meninggal tertinggi sebanyak 5 orang terjadi di Kabupaten Flores Timur.



Grafik 1. Jumlah Kasus Meninggal Akibat Rabies Tahun 2022 – 2024
(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTT, 2024)

Pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang sangat drastis untuk kasus meninggal akibat rabies sebanyak 13 orang meninggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Kondisi inilah yang menyebabkan pemerintah Kabupaten TTS memutuskan darurat wabah rabies pada tanggal 30 Mei 2023 (Robert, 2023). Jumlah kabupaten yang terpapar juga meluas menjadi 9 kabupaten pada tahun 2023 dan jumlah orang meninggal mencapai 35 orang.

Keadaan ini terus berlanjut hingga tahun 2024 dengan kasus orang meninggal akibat rabies meningkat menjadi 46 orang dan 12 kabupaten yang terpapar rabies. Timor Tengah Utara menjadi kabupaten dengan kasus orang meninggal tertinggi yaitu sebanyak 7 orang. Grafik di atas juga menunjukkan bahwa ada 4 kabupaten yaitu Lembata, Kupang, Kota Kupang, dan Belu yang tidak terpapar rabies pada tahun 2022-2023 namun terpapar pada tahun 2024 dengan kasus orang meninggal tertinggi terdapat di Kabupaten Kupang yaitu 5

orang. Sebaliknya, terdapat 2 kabupaten yaitu Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Manggarai Barat yang terpapar pada tahun 2022 namun tidak terjadi kasus orang meninggal pada tahun 2023-2024. Data pada Aplikasi Data Informasi Percepatan Penanganan Bencana Luar Biasa Rabies di Prov. NTT yang dirilis oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. NTT juga menunjukkan bahwa NTT telah mengalami kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) sebanyak 25.923 kasus di tahun 2024.

Rabies menurut WHO merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama *Lyssavirus* dan dapat dicegah dengan vaksin. Kasus rabies pada manusia sebesar 99% disebabkan oleh anjing yang menjadi perantara penularan virus tersebut. Korban dari rabies adalah anak-anak berumur antara 5 sampai 14 tahun. Rabies dapat menginfeksi mamalia, termasuk anjing, kucing, ternak, dan satwa liar (World Health Organization, 2024). Pernyataan ini didukung dengan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTT untuk kasus rabies berdasarkan kelompok umur seperti pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Kasus Rabies pada Tahun 2022 - 2024 di Provinsi NTT berdasarkan Kelompok Umur

Tahun	Kelompok Umur						
	<5	5-9	10-14	15-19	20-45	46-64	>64
2022	2.363	3.367	1.900	986	2.257	1.395	453
2023	3.601	5.246	2.905	1.293	4.017	2.600	1.046
2024	4.968	7.401	4.098	1.973	6.367	3.954	1.556
Total	10.932	16.014	8.903	4.252	12.641	7.949	3.055

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTT, 2024

Tabel 1 menunjukkan bahwa kasus rabies terbanyak (24.917 kasus) pada kelompok umur 5-9 tahun dan umur 10-14 tahun yang merupakan

kelompok anak pra-sekolah dan anak sekolah. Kelompok umur ini lebih banyak beraktivitas di luar rumah dan sekolah. Keadaan ini menyebabkan dua kelompok umur tersebut lebih rawan terkena gigitan hewan penular rabies yang biasanya adalah anjing. Selanjutnya diikuti oleh kelompok umur 20-45 tahun yang merupakan kelompok umur produktif yang banyak beraktivitas diluar rumah sehingga rawan terpapar virus rabies melalui gigitan hewan penular rabies.

Tabel 2. Jumlah Kasus GHPR Tahun 2022 - 2024

No.	Kabupaten	Jumlah Kasus GHPR		
		2022	2023	2024
1	Lembata	568	1.081	2.519
2	Flores Timur	1.857	2.665	3.031
3	Sikka	812	2.720	2.953
4	Ende	1.274	1.989	2.396
5	Nagekeo	1.973	2.110	2.688
6	Ngada	2.717	1.740	2.009
7	Manggarai Timur	1.608	1.920	2.025
8	Manggarai	1.240	1.765	1.891
9	Manggarai Barat	672	754	1.046
10	Timor Tengah Selatan (TTS)	0	2.760	2.893
11	Kupang	0	292	863
12	Kota Kupang	0	232	979
13	Timor Tengah Utara (TTU)	0	447	2.341
14	Malaka	0	160	1.759
15	Belu	0	70	926
	Jumlah	12.721	20.705	30.319

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTT, 2024

Data pada tabel 2 menggambarkan bahwa dari 15 kabupaten di wilayah NTT tercatat ada peningkatan yang signifikan terhadap jumlah kasus GHPR dari tahun ke tahun, terutama antara 2022 hingga 2024. Rata-rata kasus pada tahun 2022 sebesar 848 kasus meningkat menjadi lebih dari 2.000 kasus pada

tahun 2024. Fenomena ini mencerminkan adanya peningkatan transmisi rabies, baik akibat terbatasnya upaya pengendalian populasi anjing penular maupun belum optimalnya cakupan vaksinasi hewan.

Salah satu penyebab tingginya kasus rabies dan meluasnya daerah yang terpapar rabies sejak tahun 2023 adalah kondisi geografis NTT yang memberikan tantangan besar dalam penanganan GHPR. Hal ini berdampak pada potensi peningkatan angka kasus secara kumulatif. Selain itu, adanya kebebasan pergerakan hewan melalui jalur laut informal yang dapat menjadi faktor risiko penyebaran rabies antarwilayah kabupaten atau pulau sebagaimana yang terjadi di Pulau Timor yang pada tahun 2022 tidak ada kasus rabies namun pada tahun 2023 dan tahun 2024 terpapar rabies dengan angka kematian tertinggi di Kabupaten TTS. Keterbatasan infrastruktur, populasi yang padat dan luasnya wilayah juga menjadi kendala dalam logistik vaksinasi sehingga ada beberapa kabupaten yang letak wilayahnya sulit untuk dijangkau logistik vaksinasi mengalami kasus GHPR yang tinggi seperti di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur.

Kasus rabies di NTT paling banyak ditularkan oleh anjing. Data populasi anjing di NTT pada tahun 2023 sampai 23 Maret 2024, yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan Provinsi NTT, Melky Angsar, terdapat 561.094 ekor anjing yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota, seperti yang tertera pada tabel 3 berikut ini (Mei, 2024). Populasi anjing terbanyak ada di Kabupaten TTS,

yang pada tahun 2023 menjadi kabupaten dengan kasus orang meninggal akibat rabies tertinggi yaitu sebanyak 13 orang.

Tabel 3. Jumlah Populasi Anjing di Provinsi NTT Tahun 2024

No.	Kabupaten	Populasi Anjing
1	Lembata	20.074
2	Flores Timur	21.995
3	Sikka	58.003
4	Ende	47.603
5	Nagekeo	40.468
6	Ngada	41.131
7	Manggarai Timur	27.367
8	Manggarai	22.213
9	Manggarai Barat	23.815
10	Timor Tengah Selatan (TTS)	75.752
11	Kupang	53.153
12	Kota Kupang	15.000
13	Timor Tengah Utara (TTU)	43.783
14	Malaka	32.837
15	Belu	37.900
Jumlah		561.094

Sumber: Pos-Kupang.com, 2024

Uraian data-data diatas menjelaskan bahwa populasi anjing di NTT, letak geografis yang terdiri atas pulau-pulau terpisah dan wilayah perbukitan, infrastruktur transportasi dan fasilitas kesehatan yang minim, kurangnya akses terhadap vaksin rabies, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan rabies menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi wabah rabies pada tahun 2023 di NTT. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan tekanan sosial dan ekonomi yang signifikan bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Aksesibilitas yang terbatas menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan kasus, distribusi vaksin, dan pelaksanaan intervensi berbasis masyarakat. Wilayah-wilayah terpencil dengan

lebih rentan terhadap penyebaran rabies yang tidak terdeteksi. Selain itu, pergerakan anjing antar wilayah melalui jalur laut informal juga menjadi faktor penyebaran rabies yang sulit dikendalikan tanpa sistem monitoring lintas kabupaten yang kuat.

Australia-Indonesia Health Security Partnership (AIHSP) adalah inisiatif bilateral antara Australia dan Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan kesehatan kedua negara, terutama dalam menghadapi ancaman penyakit menular pada hewan dan meningkatkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif. Program AIHSP berfokus pada peningkatan kapasitas dan kolaborasi di bidang kesehatan melalui pelatihan, penelitian, dan kerja sama lintas sektor dan antar-lembaga pemerintahan. Program AIHSP dirancang untuk mengatasi tantangan tersebut melalui pendekatan komprehensif, seperti pelaksanaan vaksinasi massal, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, edukasi masyarakat, serta penguatan sistem pengawasan penyakit *zoonosis*. Kolaborasi ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, lembaga internasional, serta organisasi masyarakat sipil.

Kota Kupang merupakan salah satu kota utama di Indonesia memiliki peran besar atas kesehatan masyarakat, terutama menangani penyakit menular dari hewan seperti rabies yang sering menjadi ancaman di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang sendiri. Oleh sebab itu, AIHSP mengambil posisi strategis di Kupang untuk membantu meningkatkan sistem kesehatan melalui peningkatan infrastruktur kesehatan dan sumber daya

manusia. Program ini telah berjalan sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 dan belum dilakukan evaluasi dampak dari program ini, sehingga perlu dilakukan evaluasi dampak program AIHSP untuk keberlanjutan kerja sama ini di tahun mendatang.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada dampak kerja sama Indonesia-Australia melalui program *Australia-Indonesia Health Security Partnership* (AIHSP) terhadap penanganan rabies di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Penanganan rabies yang dimaksud mencakup aspek pencegahan (vaksinasi massal terhadap hewan dan manusia serta edukasi masyarakat), pengendalian (sistem pengawasan dan respon cepat terhadap kasus gigitan hewan penular rabies), penguatan kapasitas tenaga kesehatan dan pemerintah daerah dalam menghadapi penyakit *zoonosis*. Penelitian ini mengkaji data dari periode implementasi AIHSP, yaitu tahun 2020 sampai 2024. Studi ini hanya melibatkan wilayah administrasi di NTT sebagai lokasi penelitian tanpa membahas dampak program AIHSP di provinsi lainnya. Faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah pusat di luar konteks AIHSP tidak akan dibahas secara mendalam, kecuali yang secara langsung memengaruhi program di NTT.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi program AIHSP dalam penanganan permasalahan rabies di NTT?

- b. Bagaimana dampak program AIHSP dalam pengendalian kasus rabies di NTT?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

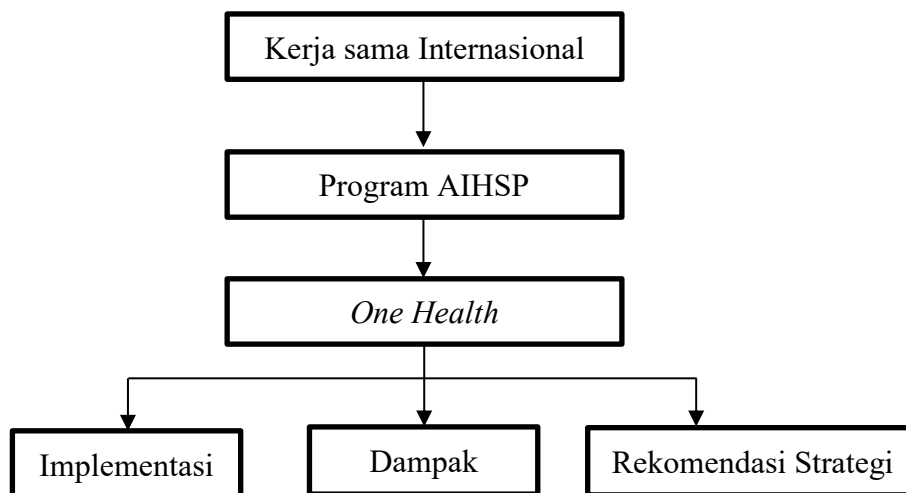
- a. Untuk mengetahui efektivitas dari program kerja sama Indonesia-Australia dalam menangani kasus rabies di NTT
- b. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh AIHSP dalam menangani kasus rabies di NTT

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan teori kerja sama internasional dan diplomasi di bidang kesehatan, seperti yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia dalam program AIHSP (*Australia-Indonesia Health Security Partnership*).
- b. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai referensi untuk penelitian mendatang mengenai studi diplomasi di mana kesehatan menjadi aspek yang digunakan untuk *soft diplomacy*, sehingga penelitian ini mampu memberikan pandangan lebih luas untuk mahasiswa/i yang ingin meneliti lebih dalam tentang *soft diplomacy* dan kerja sama internasional dalam bidang kesehatan.
- c. Secara praktikal, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam memberi informasi tentang kerja sama Indonesia-Australia dalam bidang kesehatan, terutama pada kasus rabies yang marak terjadi di Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjelaskan

efektivitas dari program AIHSP agar bisa dijadikan acuan untuk program yang sama atau serupa di masa mendatang.

D. Kerangka Konseptual



Bagan 1. Kerangka Konseptual Penelitian (diolah sendiri)

Bagan di atas menjelaskan konsep-konsep yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu kerja sama internasional. Konsep kerja sama internasional memaparkan bagaimana program AIHSP dengan pendekatan “*One Health*” berdampak pada penurunan kasus infeksi virus rabies di NTT.

1. Kerja sama Internasional

Kerja sama internasional adalah suatu bentuk hubungan yang melibatkan dua negara atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan. Konsep ini mencakup berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, hingga keamanan. Kerja sama internasional muncul dari kebutuhan negara-negara untuk saling melengkapi dan menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat ditangani sendiri secara efektif, seperti masalah perubahan iklim, kesehatan global, atau perdamaian dunia. Kerja sama internasional mengacu pada

upaya kolaboratif negara-negara dan organisasi internasional untuk mengatasi tantangan global dan mencapai tujuan bersama. Kerja sama internasional juga dapat membentuk sebuah sarana dimana negara-negara dapat saling berbagi dalam hal sumber daya, informasi, budaya, dan lain-lain (Lestari et al., 2024).

Australia-Indonesia Health Security Partnership (AIHSP) adalah contoh kerja sama internasional yang bersifat bilateral atau dua arah antara negara Indonesia dan negara Australia. AIHSP terdapat di lima provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Provinsi NTT menjadi sorotan bagi penulis karena letaknya yang berdekatan dengan Australia. Penyakit rabies yang marak terjadi di NTT tentu saja menjadi perhatian bagi Australia mengingat secara geografis letak Australia berada di bagian selatan Provinsi NTT. AIHSP mengambil posisi strategis di Kota Kupang untuk membantu meningkatkan sistem kesehatan melalui peningkatan infrastruktur kesehatan dan sumber daya manusia agar bisa mengurangi kasus rabies yang terjadi. Australia dan Indonesia telah sepakat bahwa AIHSP juga akan mendukung agenda transformasi sektor kesehatan, melalui peningkatan layanan kesehatan primer dan kesehatan masyarakat.

2. *One Health Approach*

One Health adalah pendekatan yang mengatakan bahwa kesehatan manusia sangat terkait dengan kesehatan hewan dan lingkungan di mana kita hidup. Ide ini bukanlah hal baru, tetapi pentingnya sekarang karena

hubungan manusia dengan hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitarnya semakin meningkat. COVID-19 adalah salah satu contohnya. Penyakit ini dikatakan berawal dari suatu pasar makanan laut di wilayah Wuhan, Tiongkok, yang menjual hewan-hewan lain, termasuk kelelawar, diduga menjadi sumber penyakit ini. Metode ini membantu mengatasi masalah kesehatan global seperti *zoonosis*, resistensi antimikroba, polusi udara, dan perubahan iklim.

AIHSP menggunakan konsep *One Health* dalam menjalankan tugasnya di Indonesia. Di NTT, konsep *One Health* ini digunakan untuk menyatukan kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan, karena melihat dari sifat masyarakat NTT yang masih dekat dengan alam dan hewan. Hal inilah yang menyebabkan rabies dapat berkembang dengan cepat karena banyak dari masyarakat NTT yang memelihara anjing dan tidak membawa anjing tersebut ke klinik atau dokter hewan untuk di vaksin rabies. AIHSP mengimplementasikan konsep *One Health* dengan cara membantu masyarakat di NTT dengan program vaksinasi anjing dan kucing massal yang diadakan di titik-titik yang rawan terjadi rabies.

AIHSP juga melakukan pengendalian anjing liar dengan menangkap anjing liar yang lalu di suntik vaksin rabies dan kemudian dilepaskan kembali. AIHSP memperkuat sistem pelaporan kasus gigitan hewan melalui kolaborasi dinas kesehatan, peternakan, dan pihak berwenang. Tidak sampai disitu saja, AIHSP juga melakukan kampanye kesadaran yang melibatkan

pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan pentingnya vaksinasi dan langkah pencegahan rabies. Dengan pendekatan *One Health*, diharapkan kasus rabies di NTT dapat diminimalkan, dan kesehatan masyarakat, hewan, serta lingkungan dapat dikelola secara berkelanjutan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak kerja sama Indonesia-Australia dalam program AIHSP terhadap penanganan permasalahan rabies di NTT. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konteks dan pengalaman yang terjadi pada objek penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan latar dan pengaturan tertentu dapat ditemui di kehidupan sehari-hari agar bisa digunakan menginvestigasi dan memahami fenomena seperti bagaimana fenomena itu terjadi dan mengapa fenomena itu dapat terjadi (Fadli, 2021). Metode penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam skripsi ini diimplementasikan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait dampak kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia dalam program *Australia-Indonesia Health Security Partnership* (AIHSP) terhadap penanganan permasalahan rabies di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemilihan metode ini bertujuan untuk menggambarkan realitas empirik secara komprehensif melalui pengumpulan dan analisis data yang bersifat naratif dan kontekstual.

Penelitian kualitatif tidak berorientasi pada pengukuran statistik, tetapi lebih menekankan pada pemaknaan subjektif, proses, dan dinamika yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara luas bagaimana program AIHSP diimplementasikan, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana aktor-aktor lokal memaknai keterlibatan mereka dalam program tersebut. Dengan demikian, pendekatan ini dinilai tepat untuk menganalisis interaksi antara aktor, kebijakan, serta dampak sosial dari kerja sama lintas negara.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru karena bersifat *up to date* (mutakhir) (Suryana, 2007). Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam implementasi program AIHSP di NTT. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan yang relevan. Informan dipilih secara *purposive* untuk memastikan data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian meliputi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program AIHSP, seperti perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, serta aktor-aktor lain yang relevan, termasuk mitra non-pemerintah dan organisasi keagamaan. Wawancara dirancang secara semi-terstruktur guna memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan pandangan dan pengalamannya secara bebas, namun tetap dalam koridor isu-isu penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan data

sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan program, publikasi ilmiah, dan sumber literatur lain yang relevan dengan kerja sama Indonesia-Australia dalam program AIHSP serta permasalahan rabies di NTT. Data sekunder digunakan untuk memperkaya dan menguatkan informasi yang diperoleh dari lapangan, serta memberikan landasan teoritis dalam mengkaji program AIHSP dalam kerangka kerja sama internasional dan pendekatan *One Health*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka. Wawancara adalah tatap muka interpersonal di mana satu orang (pewawancara) mengajukan beberapa pertanyaan dari orang yang diwawancarai untuk mendapatkan jawaban atas masalah penelitian (Devi et al., 2024). Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling penting. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari informan. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci untuk menggali informasi tentang pelaksanaan dan dampak kerja sama program AIHSP. Wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur agar informan dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan bebas.

Wawancara semi-terstruktur adalah penggabungan elemen wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif untuk keseimbangan bimbingan dan fleksibilitasnya. Dalam penelitian kualitatif, wawancara semi-terstruktur, di sisi lain, disebut

sebagai wawancara mendalam. Seperti namanya, wawancara semi-terstruktur terdiri dari sejumlah pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya, serta satu atau beberapa topik yang telah ditentukan sebelumnya (Georgescu & Anastasiu, 2021). Pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya ditujukan kepada semua orang yang diwawancarai yang menjadi sampel, dengan urutan yang sama dan susunan yang sama dalam panduan wawancara.

Sedangkan studi kepustakaan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dari bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Sari & Asmendri, 2020).

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif untuk mengumpulkan data tentang AIHSP, penyakit rabies, dan kerja sama Indonesia-Australia. Penulis kemudian mencapai kesimpulan, menjelaskan bagaimana kerja sama Indonesia dan Australia berdampak pada kasus rabies di NTT. Melalui teknik analisis deskriptif kualitatif, seluruh data yang terkumpul dikaji secara naratif untuk

menilai implementasi program AIHSP dan mengaitkannya dengan kerangka konseptual kerja sama internasional dan pendekatan *One Health*. Analisis ini tidak hanya mendeskripsikan apa yang terjadi, tetapi juga mengapa dan bagaimana dampak tersebut muncul. Dengan demikian, hasil penelitian menjadi lebih terarah, fokus pada tujuan utama yaitu mengevaluasi efektivitas program kerja sama dalam konteks pengendalian rabies di NTT serta memberikan rekomendasi berbasis bukti bagi kebijakan kesehatan di masa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kerja Sama Internasional

Kerja sama merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kerja sama melibatkan dua pihak atau lebih yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya "Sosiologi Suatu Pengantar", kerja sama adalah usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Soekanto menekankan bahwa kerja sama tidak hanya mempererat hubungan antar individu, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan produktif, karena melalui kerja sama, potensi dan sumber daya yang dimiliki dapat dimaksimalkan untuk kepentingan bersama (Soekanto, 2019).

Konsep kerja sama internasional merujuk pada bentuk kolaborasi antar negara yang didasarkan pada kesamaan tujuan, kepentingan bersama, serta saling ketergantungan dalam berbagai aspek kehidupan global. Konsep kerja sama internasional telah menjadi bagian penting dalam hubungan antarnegara sejak peradaban kuno. Meski tidak selalu disebut dengan istilah “kerja sama internasional” seperti sekarang, praktik saling membantu, berdiplomasi, dan membuat kesepakatan antar wilayah atau kekuasaan sudah berlangsung sejak lama.

Dalam era globalisasi, konsep kerja sama ini menjadi semakin relevan, karena banyak tantangan dan peluang yang tidak dapat diselesaikan oleh satu

negara secara sendiri. Salah satu pilar utama dalam kerja sama internasional adalah prinsip saling menghormati kedaulatan dan kesetaraan antar negara. Meskipun negara-negara memiliki kekuatan dan pengaruh yang berbeda, tetapi dengan kerja sama internasional mendorong pendekatan yang adil dan inklusif, di mana setiap negara memiliki hak untuk berpartisipasi dan menyuarakan kepentingannya. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ASEAN, Uni Eropa, dan G20 menjadi wadah penting dalam memfasilitasi dialog, negosiasi, dan pengambilan keputusan bersama yang bersifat multilateral.

Kerja sama internasional adalah suatu bentuk hubungan yang melibatkan dua negara atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan. Konsep ini mencakup berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, hingga keamanan (Wardani & Budiawan, 2021). Kerja sama internasional muncul dari kebutuhan negara-negara untuk saling melengkapi dan menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat ditangani sendiri secara efektif, seperti masalah perubahan iklim, kesehatan global, atau perdamaian dunia. Kerja sama internasional juga dapat membentuk sebuah sarana dimana negara-negara dapat saling berbagi dalam hal sumber daya, informasi, budaya, dan lain-lain (Lestari et al., 2024).

Sejarah kerja sama internasional telah berkembang secara signifikan dari zaman kuno hingga saat ini, yang dibentuk oleh berbagai faktor politik, ekonomi, dan sosial. Pada awalnya, kerja sama bersifat informal, seperti yang terlihat pada zaman Yunani kuno dengan negara-negara kota yang membentuk

aliansi (Balcerzak et al., 2022). Elżbieta menjelaskan bahwa pada saat itu, orang-orang di Yunani Kuno membentuk serikat atau organisasi yang berfokus pada kerja sama agama dan politik, yang kedua pada kerja sama politik dan militer. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa sekitar dua abad yang lalu, organisasi internasional pertama didirikan. Organisasi-organisasi ini berfokus pada kerja sama teknis di seluruh dunia. Organisasi ini muncul di bidang hubungan internasional sebagai hasil dari hubungan lintas batas antar negara yang pada saat yang sama membentuk keinginan untuk bekerja sama satu sama lain, tetapi agak terbatas jika dibandingkan dengan zaman sekarang.

Peristiwa yang terjadi di Benua Eropa juga merupakan salah satu awal digunakannya konsep kerja sama internasional. Keadaan Hongaria di kekaisaran Habsburg mengalami beberapa perubahan. Kompromi Austro-Hongaria 1867 (*Ausgleich*) menata ulang monarki Habsburg menjadi kondisi *dual monarchy*, berdampingan namun tidak sepenuhnya menyatu (Campbell, 2025). Status politik Kroasia menjadi bagian dari penyelesaian Kroasia-Hongaria pada tahun 1868. Bosnia dan Herzegovina dicaplok oleh Austria-Hongaria pada tahun 1908. Setelah 50 tahun bersatu, Austro-Hongaria bubar bersamaan dengan berakhirnya Perang Dunia I (Balogh et al., 2022). Peristiwa ini menandai upaya penyatuan yang berhasil, meskipun terdapat hambatan dari fragmentasi politik yang menjadi ciri khas wilayah tersebut namun hal ini menunjukkan bahwa entitas politik dapat bekerja sama secara efektif untuk memenuhi keuntungan bersama.

Kongres Wina (*Congress of Vienna*) yang berlangsung dari tahun 1814 sampai tahun 1815 menandai momen penting dalam pembentukan kerja sama internasional formal di antara negara-negara Eropa. Kongres ini menginisiasi kerangka kerja normatif yang mengatur penggunaan kekuatan seperti larangan perang, dan menekankan pentingnya keamanan kolektif untuk mencegah agresi dan mengelola konflik (Simon, 2024). Kerangka kerja ini juga menekankan pentingnya keamanan kolektif. Pendekatan ini berakar pada keyakinan bahwa negara-negara dapat mencapai keamanan tidak hanya melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui kerja sama dan kesepakatan bersama. Simon menjelaskan bahwa kongres ini juga menekankan pentingnya "tindakan di luar perang." Langkah-langkah ini termasuk intervensi diplomatik, sanksi ekonomi, dan bentuk-bentuk tekanan lain yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tanpa menggunakan kekerasan, tetapi mempertahankan ketertiban dan menanggulangi konflik antar negara. Aspek kongres ini menunjukkan bagaimana hubungan internasional berkembang dan bagaimana negara mengendalikan ketegangan tanpa perang.

Kerja sama internasional di zaman modern ditandai dengan interaksi yang kompleks antara globalisasi, integrasi regional, dan munculnya tantangan-tantangan global baru. Hubungan antar negara di abad 21 ini telah berubah karena kemajuan teknologi dan perubahan lingkungan geopolitik. Hal ini ditandai dengan merosotnya dominasi negara barat di dunia. Adanya pandemi COVID-19 telah merusak tatanan kesehatan global di tahun 2020, yang mengakibatkan turunnya lapangan pekerjaan yang tajam, peningkatan

kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang buruk terutama di negara-negara barat. Ketidacukupan kapasitas tata kelola sosial adalah salah satu dari banyak masalah yang ditimbulkan oleh tantangan-tantangan ini selain melemahkan kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Krisis hutang di belahan Eropa melanda Yunani pada tahun 2009. Kemudian kondisi krisis ini menyebar ke Spanyol, Italia, dan negara-negara sekitarnya (Weiping, 2022). Di negara-negara ini, krisis utang telah berkembang menjadi krisis kredit. Moneter Eropa menunjukkan cacat mobilitas yang signifikan seiring dengan eskalasi krisis. Hasil jurnal Weiping menjelaskan bahwa Tiongkok telah menjadi pemain penting dalam kerangka kerja sama internasional baru-baru ini, dengan memulai model kerja sama BRICS. Ini menunjukkan bahwa model kerja sama Utara-Selatan konvensional mengalami kesulitan, sementara model kerja sama Selatan-Selatan yang baru mulai menarik perhatian. Metode baru ini berfokus pada penyediaan barang publik untuk tata kelola global dan inklusif.

Sejak lama, Australia dan Indonesia telah menjalin kerja sama internasional. Salah satu contoh kerja sama internasional yang bersifat bilateral atau dua arah adalah *Australia-Indonesia Health Security Partnership* (AIHSP). AIHSP merupakan wujud konkret dari implementasi konsep kerja sama internasional yang dilakukan secara bilateral antara dua negara, yaitu Australia dan Indonesia, dalam bidang kesehatan, khususnya pada isu penyakit menular dan zoonosis seperti rabies. AIHSP dirancang sebagai program jangka menengah-panjang (2020–2025) yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga strategis karena menyoal penguatan sistem ketahanan kesehatan nasional dan

sub-nasional dengan basis pendekatan *One Health*. Jenis kerja sama ini tidak sama dengan kerja sama multilateral yang dilakukan oleh banyak negara atau lembaga internasional. Kerja sama bilateral memungkinkan hubungan yang lebih strategis, karena kedua pihak dapat menyesuaikan program untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Australia dan Indonesia menjadi mitra utama dalam AIHSP untuk merancang, mendanai, dan mengimplementasikan program-program kesehatan yang disepakati bersama.

Program ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk meningkatkan sistem kesehatan nasional dan regional, terutama dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani penyakit menular yang dapat menjadi wabah atau pandemi. Kedua negara bersatu karena saling bergantung dalam suatu kerja sama internasional.

Penyakit menular seperti rabies atau pandemi bersifat lintas batas negara, sehingga penanganannya memerlukan solidaritas dan kolaborasi antarnegara. AIHSP menunjukkan bahwa Australia ingin Indonesia siap menghadapi wabah karena ketahanan kesehatan Indonesia akan memengaruhi stabilitas wilayah, termasuk Australia. AIHSP mencerminkan kerja sama internasional yang menguntungkan, responsif terhadap masalah global, dan strategis secara politik dan kesehatan.

Dari perspektif hubungan internasional, AIHSP memperlihatkan bahwa kerja sama bilateral tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi dan keamanan, tetapi juga meluas ke sektor kesehatan sebagai bagian dari *soft power diplomacy*. Melalui AIHSP, Australia menjalankan peran aktif dalam

mendukung pembangunan sistem kesehatan Indonesia, sembari menjaga stabilitas wilayahnya dari risiko penyebaran penyakit lintas batas. Sementara itu, Indonesia memperoleh manfaat dalam bentuk penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya teknis, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, terutama dalam menangani penyakit rabies di Provinsi NTT. Kerja sama bilateral seperti AIHSP mencerminkan kepentingan bersama antarnegara dalam menghadapi isu-isu transnasional yang tidak dapat diselesaikan secara unilateral. Rabies sebagai penyakit zoonosis tidak mengenal batas wilayah administrasi, sehingga kolaborasi lintas negara menjadi suatu keharusan.

Australia sebagai negara bebas rabies, memiliki kepentingan langsung untuk menjaga wilayah sekitarnya dari potensi penyebaran penyakit tersebut, terutama dari negara tetangga seperti Indonesia. Melalui AIHSP, Australia dan Indonesia menunjukkan bentuk kerja sama yang saling menguntungkan (*mutual benefit*), di mana Indonesia memperoleh dukungan teknis, finansial, dan sumber daya manusia dalam penanggulangan penyakit zoonotik, sedangkan Australia memastikan stabilitas kesehatan di kawasan regional Indo-Pasifik, termasuk di wilayah perbatasannya. Kerja sama ini mencerminkan prinsip dasar kerja sama internasional, yakni adanya interdependensi, koordinasi kebijakan, dan aliansi strategis dalam penanganan isu global, dalam hal ini isu kesehatan masyarakat.

B. Konsep One Health

Konsep *One Health* menekankan keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, yang mengadvokasi pendekatan kolaboratif untuk mengatasi tantangan kesehatan. Konsep ini telah mendapatkan daya tarik karena faktor-faktor seperti pandemi COVID-19 dan perubahan iklim, yang

menyoroti perlunya kerja sama di antara berbagai sektor. Kerangka kerja *One Health* dioperasionalkan melalui kolaborasi berbagai disiplin ilmu, yang bertujuan untuk mencapai hasil kesehatan yang optimal di semua domain. Konsep *One Health* ini menguraikan tentang kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan itu saling terkait erat satu sama lainnya. Hal ini berarti bahwa untuk mengatasi masalah kesehatan di satu area dapat berdampak signifikan pada area lainnya. Sebagai contoh, penyakit rabies pada anjing dapat menular pada manusia yang tergigit oleh anjing atau air liur anjing yang terinfeksi virus rabies mengenai luka terbuka pada manusia. Sebaliknya, manusia yang menderita TBC dan memelihara anjing, maka virus TBC tersebut dapat menular ke anjing peliharaan tersebut.

Konsep *One Health* berawal pada abad ke-19. Rudolf Virchow, yang dikenal sebagai bapak patologi seluler, memberi pengaruh besar dalam bidang kedokteran dan kedokteran hewan dengan mengakui aspek-aspek yang berhubungan dan sebanding antara keduanya. Istilah "*One Medicine*" pertama kali digunakan oleh Osler, salah satu murid Virchow, tetapi Calvin Schwabe menggunakannya kembali pada abad ke-20 (Prata et al., 2022). Dalam bukunya, Schwabe menggambarkan "*One Medicine*" sebagai interaksi antara kesehatan manusia dan hewan dan membahas epidemiologi penyakit menular dan tidak menular serta ketahanan pangan dari sumber-sumber hewani.

Perkembangan pendekatan *One Health* secara signifikan dipengaruhi oleh berbagai penyakit *zoonosis*, yaitu penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Momen ketika *One Health* benar-benar mendapatkan

perhatian kembali adalah saat pandemi COVID-19. Saat itu banyak beredar kabar bahwa virus COVID-19 berasal dari hewan kelelawar di Wuhan, China. Hal ini menyebabkan banyak orang menganggap bahwa virus COVID-19 adalah virus yang berasal dari hewan, sama seperti virus hewan lainnya seperti rabies, virus Flu Burung, dan lain-lain. Konsep *One Health* mulai diperhatikan kembali karena muncul kesadaran bahwa kesehatan manusia bergantung kepada lingkungan dan hewan-hewan disekitarnya. Pada akhirnya, pemimpin empat organisasi global yaitu *Food and Agriculture* (FAO), *World Organisation for Animal Health* (WOAH), *United Nation Environment Programme* (UNEP) dan *World Health Organization* (WHO) menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) *Quadripartite* pada 17 Maret 2022, yang memulai era baru kolaborasi *One Health* (Aditama, 2023).

Quadripartite tersebut membagi enam bagian untuk diperhatikan dalam konsep *One Health* ini. Enam bagian tersebut adalah (Pitt & Gunn, 2024):

1. Layanan laboratorium

Bagian ini menekankan betapa pentingnya layanan laboratorium yang kuat untuk mendiagnosis penyakit pada manusia dan hewan. Layanan laboratorium yang efektif sangat penting untuk memantau tren kesehatan, melakukan penelitian, dan memastikan respons yang tepat waktu terhadap wabah. Layanan laboratorium juga memfasilitasi deteksi patogen dan penilaian risiko kesehatan, yang sangat penting untuk menerapkan strategi *One Health* secara efektif.

2. Pengendalian penyakit *zoonosis*

Fokus dari bagian ini adalah untuk mengembangkan strategi untuk mencegah dan mengendalikan penyakit *zoonosis*, yang menimbulkan risiko kesehatan masyarakat yang signifikan. Penyakit *zoonosis* dapat ditularkan antara hewan dan manusia, dan pengawasan, vaksinasi, dan kampanye kesadaran masyarakat adalah bagian penting dari pengendalian *zoonosis*. Mereka membantu mengurangi wabah dan melindungi populasi manusia dan hewan.

3. Penyakit tropis yang terabaikan (*Neglected Tropical Diseases*/NTD)

Kelompok penyakit yang memengaruhi daerah miskin, terutama di wilayah tropis dan subtropis. Bagian ini berusaha mengatasi kesenjangan kesehatan yang terkait dengan NTD dengan mendorong penelitian, meningkatkan akses terhadap pengobatan, dan meningkatkan infrastruktur kesehatan masyarakat. Pendekatan *One Health* memerlukan kolaborasi lintas sektor—kesehatan, pertanian, dan pengelolaan lingkungan untuk mengatasi penyakit-penyakit ini.

4. Resistensi antimikroba (*Antimicrobial Resistance*/AMR)

Resistensi antimikroba, juga dikenal sebagai AMR, merupakan ancaman bagi kesehatan di seluruh dunia yang terus meningkat. Resistensi antimikroba terjadi ketika mikroorganisme berkembang biak untuk melawan efek obat-obatan. Bagian ini menunjukkan betapa pentingnya upaya kolaboratif untuk memerangi AMR melalui penggunaan antibiotik dengan batas yang wajar dalam pengobatan manusia dan hewan.

Pendidikan, perubahan kebijakan, dan penelitian tentang pengobatan alternatif sangat penting untuk mencegah AMR secara efektif.

5. Keamanan pangan

Bagian ini sangat penting karena keamanan pangan harus diperhatikan untuk menghindari penyakit bawaan makanan dan melindungi kesehatan masyarakat. Bagian ini mencakup pemantauan proses produksi pangan, penerapan standar keamanan, dan memberi edukasi kepada konsumen tentang cara menangani makanan dengan aman. Pendekatan *One Health* menyadari bahwa keamanan rantai pasokan pangan terkait dengan kesehatan hewan dan kondisi lingkungan, sehingga strategi yang komprehensif diperlukan untuk memastikan keamanan pangan.

6. Kesehatan lingkungan

Kesehatan lingkungan berfokus pada dampak faktor lingkungan terhadap kesehatan manusia dan hewan. Bagian ini menyinggung isu-isu seperti polusi, perubahan iklim, dan kerusakan habitat yang dapat menyebabkan risiko kesehatan. Strategi di bagian ini bertujuan untuk mendorong praktik berkelanjutan, melindungi ekosistem, dan mengurangi bahaya lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan.

Konsep *One Health* dapat diterapkan dan bekerja dengan baik jika ada upaya kolaboratif. Komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi di antara semua pemangku kepentingan. Keterlibatan berbagai kelompok sangat penting untuk memajukan ideologi *One Health* dan untuk mengatasi masalah kesehatan. Kelompok ini termasuk pemerintah, peneliti, pembuat kebijakan, dan anggota

masyarakat yang bekerja sama untuk menemukan solusi yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

AIHSP secara eksplisit mengadopsi dan menerapkan prinsip *One Health*, yaitu pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dalam satu kerangka penanganan penyakit. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks penyakit rabies, karena penyakit ini berasal dari hewan (anjing) dan berdampak langsung pada manusia, dengan faktor lingkungan yang turut memengaruhi penyebaran virus. AIHSP memfasilitasi kerja sama antara Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan/Kesehatan Hewan, Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), dan Pemerintah Daerah untuk saling berkolaborasi dalam mengatasi permasalahan penyakit rabies yang terjadi di NTT. Pendekatan ini digunakan AIHSP untuk mengintegrasikan berbagai sektor guna meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan masyarakat.

AIHSP mendorong pembentukan dan penguatan struktur lintas sektor, seperti kolaborasi antara Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, universitas, organisasi keagamaan, dan lembaga konservasi alam. Program ini juga mengintegrasikan aspek teknis seperti pengawasan epidemiologi, vaksinasi HPR, serta edukasi masyarakat berbasis budaya lokal sebagai bagian dari strategi *One Health*. Dengan demikian, AIHSP tidak hanya menjadi alat diplomasi kesehatan, tetapi juga contoh implementasi *One Health* yang komprehensif di tingkat regional dan komunitas. AIHSP menunjukkan bahwa konsep kerja sama internasional dan pendekatan *One Health* bukanlah dua hal

yang terpisah, melainkan terjalin erat dalam praktik kerja sama lintas negara. Dalam program ini, prinsip-prinsip dasar kerja sama internasional seperti solidaritas, kesetaraan, saling menguntungkan, dan keberlanjutan dihubungkan secara sinergis dengan konsep *One Health* yang menekankan interkoneksi antara manusia, hewan, dan lingkungan.

AIHSP sebagai kebijakan bersama antara Indonesia dan Australia menempatkan kesehatan sebagai isu strategis internasional yang perlu ditangani melalui pendekatan kolaboratif dan holistik. Program ini bukan hanya bentuk bantuan teknis, tetapi juga menjadi wahana pembelajaran bersama dan penguatan diplomasi kesehatan (*health diplomacy*). Australia dan Indonesia tidak hanya bertindak sebagai pemberi dan penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra sejajar dalam upaya membangun ketahanan kesehatan regional yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada prinsip keadilan sosial dan solidaritas global.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini. Penelitian terdahulu berperan penting dalam memberikan landasan teoretis dan empiris bagi kajian ini. Beberapa studi telah membahas kerja sama bilateral Indonesia dan Australia. Diharapkan dengan adanya penelitian terdahulu ini dapat membantu untuk meneliti bagaimana AIHSP sebagai bentuk kerja sama bilateral Australia dan Indonesia dalam mengatasi masalah penyakit rabies di NTT. Sumber penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Faiz Ramadhan dan Badrus Sholeh yang berjudul “*Kerja sama Australia dan Indonesia dalam menghadapi COVID-19*” (Ramadhan & Sholeh, 2021). Penelitian ini membahas tentang Australia yang memberikan bantuan kepada Indonesia saat pandemi COVID-19. Faiz dan Badrus dalam jurnalnya menjelaskan bahwa Indonesia kesulitan dalam menangani kasus COVID-19, berbanding terbalik dengan Australia yang mampu mengatasi masalah virus COVID-19 dinegaranya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan respons kedua negara ketika kasus COVID-19 pertama terkonfirmasi terjadi di negara masing-masing. Bantuan yang Australia berikan adalah dukungan keuangan, perlengkapan dan peralatan medis, dan bantuan teknis dan para ahli.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah dan Farhan Nafi’uddin dengan judul “*Australia-Indonesia Cooperation In Natural Disaster Management In Indonesia Through The AIFDR Program 2009-2015*” (Azizah & Nafi’uddin, 2024). Penelitian ini membahas tentang Indonesia yang membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Namun Australia melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa BPBD memiliki dana yang terbatas, sehingga Australia mengambil langkah untuk membantu melalui *Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction* (AIFDR) dengan pendanaan dari *Australian Agency for International Development* (AusAID). Kerja sama ini secara resmi diumumkan pada saat konferensi *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) tahun 2008 dan mulai berlaku pada tahun 2009.

3. Penelitian dari Yusep Ginanjar dan I Wayan Haditya Harikesa yang berjudul *“Implementasi Program Sanitasi Australia Indonesia Infrastructure Grants For Sanitation/SAIIG Di Kota Cimahi Jawa Barat Pada Tahun 2020-2021”* (Ginanjar & Harikesa, 2021). Penelitian ini menjelaskan Kota Cimahi yang berada di Provinsi Jawa Barat melakukan kerja sama dengan pihak dari Australia untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sanitasi, seperti sistem drainase dan fasilitas pengelolaan limbah. Peningkatan ini diharapkan dapat mengurangi risiko kesehatan yang terkait dengan sanitasi yang buruk dan pengelolaan air limbah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kota Cimahi. Kerja sama ini sejalan dengan tujuan yang lebih luas dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang terkait dengan kesehatan dan sanitasi.